



FAST RESPONSE
WWW.FRN.CO.ID

Raperda Perubahan APBD Disampaikan kepada Gubernur untuk Dievaluasi Sesuai Amanat Undang-Undang

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.FRN.CO.ID

Sep 26, 2023 - 20:55



PANGANDARAN JAWA BARAT - Persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD melalui Rapat Paripurna ini, akan disampaikan kepada gubernur jawa barat untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan

perundang-undangan.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam pidato sambutannya dalam rangka paripurna pembicaraan TK.II penandatanganan keputusan DPRD dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023. bertempat di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Selasa (26/09/2023).

Disampaikannya bahwa, dengan persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun 2023 hari ini, menjadi pertanda bahwa koordinasi dan kerjasama yang baik serta kepatuhan dalam menyelesaikan semua tahapan pembahasan RAPBDP 2023 ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandara.

Penyusunan Raperda perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023.

Berbagai catatan, pertanyaan serta koreksi yang disampaikan DPRD tentang keterkaitan antara kesesuaian indikator aturan belanja serta kebutuhan pencapaian kinerja, baik pada penyampaian pandangan umum maupun melalui rapat kerja komisi dengan SKPD dan antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD, telah dilakukan pembahasan dan ditindaklanjuti secara transparan dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga," katanya.

Lanjut Jeje, persetujuan bersama Raperda perubahan APBD melalui Rapat Paripurna ini, akan disampaikan kepada gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Evaluasi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi

aspek teknis, aspek material dan aspek legalitas," ucapnya.

Menurut Jeje, hasil evaluasi gubernur menjadi pedoman untuk penyempurnaan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian dituangkan pada keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Selanjutnya, Raperda Perubahan APBD ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah.

Diharapkan seluruh OPD segera melakukan efektivitas pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan kualitas.

Anggaran yang disiapkan dalam Perubahan-APBD adalah anggaran maksimal. Oleh karenanya, efisiensi dalam pelaksanaan belanja tetap harus memperhatikan prioritas pembangunan dan kondisi keuangan daerah serta senantiasa memperhatikan kepatuhan dan kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Tambah Jeje, hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan, mari kita niatkan semua ini bagian dari ibadah kepada alloh swt dan pengabdian kepada masyarakat kabupaten pangandaran. seraya bermohon kepada alloh swt agar kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang kita rencanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Parigi, 26 September 2023
Bupati Pangandaran
H. Jeje Wiradinata. (Anton AS)